

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sebab hanya dengan bimbingan dan kemampuan yang diberikanNya maka Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dapat disusun.

Kami menyadari dalam penyusunan ini masih dijumpai adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penulisannya, sehingga saran guna perbaikan sangat berguna bagi penyempurnaan penyusunan diwaktu yang akan datang.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan sebagai dokumen Perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perubahan pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tondano, September 2023

KEPALA DINAS,



DJEFFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun Lalu dan Capaian RenstraPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan FungsiPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Rencana Kerja Perubahan Awal Tahun 2023

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan adalah salah satu masalah besar yang sedang dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan indikator masih rendahnya suatu bangsa.

Mengatasi masalah tersebut di atas tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi yang membidangi ketenagakerjaan, tetapi harus diupayakan secara sungguh – sungguh, terencana, berkesinambungan dan lintas sektoral. Masalah di bidang ketenagakerjaan yang menonjol di Kabupaten Minahasa adalah :

- a. Pengangguran yang cukup tinggi
- b. Orientasi mengenai Renja OPD
- c. Pengumpulan Data dan Informasi

1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan OPD

Sesuai dengan PERMENDAGRI No. 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah maka setiap instansi wajib menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dengan mengacu kepada rancangan RKPD, berpedoman pada RENSTRA dan RPJPD.

Rencana Kerja Perubahan OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah yang definitif. Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: Tahap perumusan Rencana Kerja Perubahan SKPD; dan Tahap penyajian rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah.

Tahapan tersebut terdiri dari:

a. Tahap Perumusan Renja OPD

Perumusan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: pengolahan data dan informasi,

analisis gambaran pelayanan OPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Organisasi Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD, penyempurnaan rancangan Renja OPD, pembahasan forum OPD, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

b. Tahap Penyajian Rencana Kerja Perubahan OPD

Penyajian rancangan Renja OPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

BAB IV Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas
Tenaga Kerja

BAB V Penutup

2. Penetapan Rangan Awal Renja OPD

Dengan melihat arti strategis dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah Tahun 2020 antara lain :

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Rancangan awal Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja “Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”.

dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022. Penyusunan Renja OPD Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke-1 dari Rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019-2023 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023, dimana Renja Dinas Tenaga Kerja yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran OPD Dinas Tenaga Kerja.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dalam menyusun Rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang – Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 2918)
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14)
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
15. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2015;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/EBGS
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011) tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa dan Keputusan Bupati Minahasa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
30. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023;
33. Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan tugasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan tugasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

a. Gambaran Umum Instansi

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Balai Latihan Kerja Kabupaten Minahasa Menguraikan :

1. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

2. Fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas yang dimaksud tersebut di atas :
- a) Pelaksanaan Pembinaan kewenangan di bidang Ketenagakerjaan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan pembinaan di bidang ketenagakerjaan;
 - c) Penyusunan Program pengembangan Ketenagakerjaan;
 - d) Pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang ketenagakerjaan;
 - e) Pembinaan Sumber Daya Manusia aparatur di bidang ketenagakerjaan;
 - f) Pembinaan dan Pelatihan ketenagakerjaan;
 - g) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri;
 - h) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja luar negeri;
 - i) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS);
 - j) Pembinaan Norma Kerja;
 - k) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan pengadministrasian umum;
 - l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi ; dan
 - m) Penyusunan dan penyampaian laporan di bidang ketenagakerjaan;

b. Organisasi

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa seperti yang dituangkan dalam Perda No. 62 Tahun 2016 ini terdiri dari :

Seorang Kepala Dinas

Seorang Sekretaris yang membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Tiga orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga seksi :

1. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas membawahi :
 - a) Seksi Pelatihan Kerja;
 - b) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - c) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan
2. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja membawahi :
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Perluasan Kerja; dan
 - c) Seksi Informasi Pasar Kerja.
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial membawahi :
 - a) Seksi Hubungan Industrial;
 - b) Seksi Kesejahteraan Pekerja; dan
 - c) Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT
 DAERAH TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS
 TENAGA KERJA
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rancangan Awal Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2022 meliputi tiga hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2.1

TABEL REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022														
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MINAHASA														
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai Dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
			K	Rp	K	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10	11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA													
2 0 7	TENAGA KERJA		10,257,032,105	-	2,497,812,199	5,373,031,085	4,914,088,409	91	5,394,437,545	5,264,262,560	98			
2 0 7 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM Perangkat daerah	3,127,552,105	-	2,094,612,199	2,349,031,085	2,259,688,409	96	2,370,437,545	2,240,262,560	95			

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

2	0	0	2	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		5,000,000		0		0		0		0		0	
2	0	0	2	0	0		Jumlah Rancangan Renja yang tersusun		0		0		0		0		0		0	
							Jumlah Rancangan Perubahan Renstra yang tersusun		0		0		0		0		0		0	
2	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap/Berita Acara Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	2,500,000		0		0		0		0		0	
							Jumlah Rancangan Dok Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Tersusun	1 Dok	2,500,000		0		0		0		0		0	
2	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		2,401,912,153		1,924,098,949		2,170,800,000	500	2,092,696,409	96	2,192,926,585		2,076,000,000	95

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

2	0	0	2	0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	19 Orang	2,401,912,153	19 Orang	1,924,098,949	18 Orang	2,170,800,000	18 Orang	2,092,696,409	96	2,192,926,585	2,076,000,000	95
2	0	0	2	0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja		87,780,000		0		0		0		0	0	
2	0	0	2	0	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH yang disediakan	22 Stell	24,480,000		0		0		0		0	0	
								Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu Yang Disediakan	23 Stell	24,000,000		0		0		0		0	0	
								Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	24 Stell	24,000,000		0		0		0		0	0	
2	0	0	2	0	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	15,300,000		0		0		0		0	0	
2	0	0	2	0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang		85,735,752		39,992,600		-		-		2,622,560	2,622,560	100

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA **2023**

2	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan		165,625,000	-	106,864,600	139,751,085	132,112,500	95	147,388,400	134,140,000	91	
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia	330 Lembar	3,300,000	65 Lembar	390,000	55 Lembar	13 Lembar	550,000	100	1,040,000	1,040,000	100
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi/Telepon/Fax tersedia	50 Mbps	18,000,000			12 Bulan	12 Bulan	11,620,000	65	18,000,000	15,600,000	87
							Jumlah Jasa listrik tersedia	7.300 Kwh	7,225,000	12 Bulan	885,000	12 Bulan	12 Bulan	6,001,085	79	7,225,000	7,200,000	100
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (sesuai jenis yang diadakan) misalnya kertas F4, Kertas A4, Pulpen, dll	47 Unit / Paket	5,100,000	1 Paket	2,149,600	1 Paket	-	0		2,323,400	2,300,000	99
2	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL tersedia	2 Orang	72,000,000	2 Orang	55,440,000	2 Orang	2 Orang	67,200,000	100	67,200,000	60,000,000	89
							Jumlah Petugas Kebersihan tersedia	1 Orang	30,000,000	1 Orang	24,000,000	1 Orang	1 Orang	24,000,000	100	27,600,000	24,000,000	87
							Jumlah Sopir tersedia	1 Orang	30,000,000	1 Orang	24,000,000	1 Orang	1 Orang	24,000,000	100	24,000,000	24,000,000	100
2	0	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi		378,499,200		23,204,350	38,480,000	34,879,500	91	27,500,000	27,500,000	100	

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Per Organ Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	78,499,200	1 Unit	22,020,300	1 Unit	38,480,000	1 Unit	34,879,500	91	27,500,000	27,500,000	100
2	0	0	2	0	0	0	0	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (sesuaikan jenis nama peralatan/mesin yang dipelihara)			1 Unit	1,184,050	1 Unit				0	0	0	
2	0	0	2	0	0	0	0	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diRehabilitasi	30 M2	150,000,000		0		0		0		0	0	
2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Sarana Pendukung Yang di Pelihara dan Direhabilitasi	30 M2	150,000,000		0		0		0		0	0	
	0	0								PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja		10,000,000		0		0		0		0	0	
	0	0	2	0						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja		10,000,000		0		0		0		0	0	
	0	0	2	0	0	0	0	0	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	1 Dok	5,000,000		0		0		0		0	0	

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

	0	0	2	0	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	1 Dok	5,000,000		0		0		0		0	0
2	0	0				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja		3,803,000,00		0		0			-		0
2	0	0	2	0		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan		3,803,000,00		0		0					0
2	0	0	2	0	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	250 Orang	3,803,000,00		0		0			0		0
2	0	0				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan		192,000,000	-	0	-	0	-	0			0
2	0	0	2	0		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat		0	-	0	-	0	-	0			0
2	0	0	2	0	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Volume Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat		0		0		0					0

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

2	0	0	2	0		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja		0	-	0	-	0	-	0		0	0	
2	0	0	2	0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja		0		0		0		0		0	0	
2	0	0	2	0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan kesempatan kerja		192,000,000	-	0	-	0	-	0		-	0	
2	0	0	2	0	0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	462 Orang	192,000,000		0		0		0			0	
2	0	0				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terselenggaranya pendataan dan Informasi HI		3,124,480,00		403,200,00		3,024,000,00		2,654,400,00	88	3,024,000,00	3,024,000,00	100
2	0	0	2	0		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,084,480,00		403,200,00		3,024,000,00		2,654,400,00	88	3,024,000,00	3,024,000,00	100

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

2	0	0	2	0	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial	15.00 0 Orang	3,084,480,00 0	8.000 Orang	403,200,00 0	15.00 0 Orang	3,024,000,00 00	15.00 0 Orang	2,654,400,00 00	88	3,024,000,00 00	3,024,000,00 00	100
2	0	0	2	0	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Tesedianya Perusahaan yang baik yang mengikuti aturan		40,000,000		0		0		0		0	0	
2	0	0	2	0	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	100 Orang	40,000,000		0		0		0		0	0	
2	0	0	2	0	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi penyelesaiannya		0		0		0		0		0	0	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan Catatan Strategis

Isu – isu yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan dewasa ini adalah :

1. Terbatasnya SDM Aparatur Sipil Negara
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas
3. Tingkat kualitas dan produktifitas pencari kerja/tenaga kerja relatif masih rendah
4. Tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi
5. Lapangan kerja yang tersedia masih terbatas
6. Kurangnya jiwa dan semangat kewirausahaan pencari kerja/tenaga kerja
7. Masih banyak ditemui pencari kerja/ tenaga kerja hanya memilih pekerjaan pada sector formal ataupun menjadi CPNS
8. Masih ditemui perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 50 orang belum membentuk LKS Bipartit, Sementara LKS Bipartit yang ada belum berfungsi dengan baik
9. Masih ada perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
10. Masih sering terjadi kasus Pemutusan Hubungan Kerja
11. Perselisihan Hubungan Industrial masih relative tinggi
12. Kurangnya Tenaga Teknis dibidang ketenagakerjaan baik kualitas maupun kuantitas turut menghambat proses penanganan dan pemecahan masalah-masalah tersebut di atas.

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (di luar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
I. Gambaran Pelayanan SKPD					
1. Pelayanan Pelatihan Kerja	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	SPM Bidang Pelatihan dan Produktivitas	- Kapasitas SDM aparatur Bidang Pelatihan dan Produktivitas dalam penyediaan informasi dan penyelenggaraan kebijakan	Dukungan Sektor terkait	1. Kurangnya tenaga pelatih yang profesional
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Ketersediaan Informasi Tenaga Kerja/Lowongan Kerja dan Jumlah Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan	SPM Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	- Kapasitas SDM Aparatur Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dalam Penyediaan Informasi	Dukungan Sektor/Kelembagaan Terkait	1. Kurangnya Pegawai Pengantar kerja
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Penyelesaian Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	SPM Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	- Kapasitas SDM Aparatur Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Dukungan Sektor/Kelembagaan Terkait	1. Kurangnya Pegawai Mediator

Tabel 2.4

**Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan SKPD Dinas Tenaga Kerja
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sector Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata	1. Kurangnya Instruktur yang berstatus ASN 2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas 3. Tingkat Kualitas dan Produktifitas Pencari Kerja/Tenaga Kerja relatif rendah 4. Pelaksanaan Program Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja perlu dijadikan unggulan dan kontinyu serta dilaksanakan sesuai yang diharapkan 5. Keterbatasan Anggaran karena Refocusing anggaran	1. Instruktur yang ada sudah masuk dalam usia purna bakti 2. Peralatan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas teknis masih terbatas(perangkat IT)	Adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Visi, Misi Program untuk meningkatkan SDM sehingga dialokasikan dana untuk program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja
	1.			
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Keterbatasan Anggaran karena Refocusing anggaran 2. Tingkat Pendidikan Formal tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada 3. Masih kurangnya personil yang ada di bidang penempatan dan perluasan kerja	1. Ketiadaan dana untuk menunjang pelaksanaan program 2. Tidak ada pegawai fungsional pengantar kerja di bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	1. Diklat Pegawai Pengantar Kerja 2. Peningkatan Kualitas PersonilKebutuhan 3. Masyarakat akan pekerjaan tinggi
IV	Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan			

1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran karena Refocusing anggaran 2. Belum tersedianya dokumen rencana tenaga kerja 	Ketiadaan dana untuk menunjang pelaksanaan program	Kebutuhan akan dokumen perencanaan tenaga kerja
2.	Program Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran karena Refocusing anggaran 2. Belum semua masyarakat usia kerja tercover dalam Program Mapalus 3. Kurangnya pemahaman perusahaan mengenai Hubungan Industrial dan BPJS Ketenagakerjaan 4. Belum terbentuknya lembaga Bipartit, Tripartit dan PP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Tenaga Mediator 2. Pengusaha belum sepenuhnya mengenali fasilitasi dan perlindungan tenaga kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penambahan pegawai mediator 2. Adanya pelatihan dan sosialisasi mengenai peraturan ketenagakerjaan
V	Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik.			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran karena Refocusing anggaran 2. Terbatasnya sarana prasarana perkantoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan perlengkapan kantor rusak dan terbatas 2. Jumlah ASN terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih status pegawai structural ke fungsional

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat maupun OPD merupakan hal yang sangat penting dalam suatu dokumen perencanaan. Namun usulan yang di sampaikan oleh masyarakat maupun OPD dalam Forum OPD yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa karena mereka meminta bantuan sarana dan dana.

TABEL 2.5

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2023
PROVINSI SULAWESI UTARA KABUPATEN MINAHASA
DINAS TENAGA KERJA
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2023
PROVINSI SULAWESI UTARA KABUPATEN MINAHASA
DINAS TENAGA KERJA**

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATA TAN
1						2	3	4	5	6
2						URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				
2	07					Tenaga Kerja				
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah		
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
2	07	03	2	01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		

2	07	03	2	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	TONDANO, JAPAN, MANADO	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kompetensi pada Tahun n	450 Orang	
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	TONDANO	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota		
2	07	04	2	01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat		
2	07	04	2	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	-	Volume Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat		
2	07	04	2	03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	TONDANO	Terlaksananya Job Fair / Bursa Kerja		
2	07	04	2	03	03	Job Fair/Bursa Kerja	TONDANO	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja	550 Orang	
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	MINAHASA	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)		
2	07	05	2	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	MINAHASA	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota		
							-	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
2	07	05	2	02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	MINAHASA	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	15.000 Orang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran.

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah :

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang handal dan professional dalam mendukung peningkatan daya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Menurunkan angka pengangguran

3.1.2 Sasaran

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan dilakukan untuk mencapai sasaran antara lain;

1. Meningkatkan Penunjang unsur tenaga kerja terhadap kepuasan stakeholder.
2. Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja.
3. Meningkatkan Hubungan Industrial
4. Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
5. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja.

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

- a.Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
- c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Job Fair/Bursa Kerja

4.PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- a.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

5. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

- Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja : Rencana Tenaga Kerja Makro dan Rencana Tenaga Kerja Mikro

3.3 Rencana Kerja Perubahan Tahunan 2023

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rancangan Awal Tahunan Tahun 2023 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan dan Pemerintahan Tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, merencanakan program dan kegiatan tahun 2023. Adapun Indikator Kinerja Utama dan Kelompok Sasaran adalah:

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa yaitu :

- 1) Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan kerja;
- 2) Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan ;
- 3) Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan;

b. Kelompok Sasaran

Adapun kelompok sasaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
1.	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	<p>ASN Dinas Tenaga Kerja</p> <p>ASN Dinas Tenaga Kerja</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi d. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	<p>ASN Dinas Tenaga Kerja</p>
2.	<p>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</p> <p>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan 	<p>Masyarakat Pencari Kerja</p>

	Klaster Kompetensi	
3.	<p>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</p> <p>a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan Kesempatan Kerja <p>b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS <p>c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Job Fair/Bursa Kerja 	<p>Masyarakat Pencari Kerja</p>
4.	<p>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</p> <p>a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 	<p>Masyarakat Pencari Kerja</p>
5.	<p>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</p> <p>a. Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Tenaga Kerja Makro - Rencana Tenaga Kerja Mikro 	<p>OPD dan Perusahaan</p>

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

A. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			ALASAN PERUBAHAN						
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023							
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
					Rp	Rp	Rp							
2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA													
2	07					10.257.021.095	5.804.699.778	6.547.304.984						
2	07	01				3.127.552.105	2.201.250.600	2.396.945.788						
2	07	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000	1.249.200	0	REFOCUSING		
2	07	01	2	01	01				Jumlah Rancangan Renja yang tersusun	Jumlah Rancangan Renja yang tersusun	0	0		
									Jumlah Rancangan Perubahan Renstra yang tersusun	Jumlah Rancangan Perubahan Renstra yang tersusun	0	0	0	

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

2	07	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap/Berita Acara Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap/Berita Acara Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	1.249.200		REFOCUSING
								Jumlah Rancangan Dok Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Tersusun	Jumlah Rancangan Dok Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Tersusun	2.500.000	0	0	REFOCUSING
2	07	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	2.401.912.153	1.986.769.000	2.092.418.171	PENYESUAIAN GAJI DAN TUNJANGAN
2	07	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	2.401.912.153	1.986.769.000	2.092.418.171	PENYESUAIAN GAJI DAN TUNJANGAN
2	07	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	87.780.000	-	-	
2	07	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH yang disediakan	Jumlah PDH yang disediakan	24.480.000	0	0	
								Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu Yang Disediakan	Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu Yang Disediakan	24.000.000	0	0	
								Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia	24.000.000	0	0	

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

2	07	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.300.000	0	0	
2	07	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	85.735.752	51.434.000	49.154.000	
2	07	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pencetakan	Jumlah pencetakan	500.000	500.000	500.000	
								Jumlah penggandaan	Jumlah penggandaan	5.575.752			
2	07	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	Jumlah tamu yang terfasilitasi	6.060.000	2.280.000		REFOCUSING
								Jumlah Penggandaan	Jumlah Penggandaan	2.100.000	0	0	
2	07	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap/berita acara hasil koordinasi luar daerah	Jumlah Lap/berita acara hasil koordinasi luar daerah	45.000.000	34.254.000	91.344.000	PENYESUAIAN KEGIATAN
								Jumlah Lap/berita acara hasil koordinasi dalam daerah	Jumlah Lap/berita acara hasil koordinasi dalam daerah	26.500.000	14.400.000	18.675.000	PENYESUAIAN KEGIATAN
2	07	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)	Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)	3.000.000	2.208.400	26.170.470	

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

2	07	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan)	3.000.000	2.208.400	26.170.470	KEBUTUHAN MENDESAK / PENYESUAIAN KEGIATAN
2	07	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	165.625.000	132.095.300	140.343.447	
2	07	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia	Jumlah materai tersedia	3.300.000			
2	07	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi/Telepon/Faxtersedia	Jumlah Jasa Komunikasi/Telepon/Faxtersedia	18.000.000	25.226.100	25.226.100	
							Jumlah Jasa listrik tersedia	Jumlah Jasa listrik tersedia	7.225.000				
2	07	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (sesuai jenis yang diadakan) misalnya kertas F4, Kertas A4, Pulpen, dll	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (sesuai jenis yang diadakan) misalnya kertas F4, Kertas A4, Pulpen, dll	5.100.000	2.069.200	2.317.347	PENYESUAIAN KEGIATAN
2	07	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL tersedia	Jumlah THL tersedia	72.000.000	40.000.000	48.000.000	PENYESUAIAN HONOR
								Jumlah Petugas Kebersihan tersedia	Jumlah Petugas Kebersihan tersedia	30.000.000	31.200.000	31.200.000	
								Jumlah Sopir tersedia	Jumlah Sopir tersedia	30.000.000	33.600.000	33.600.000	
2	07	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	378.499.200	27.494.700	27.494.700	
2	07	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Per Organ Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Per Organ Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	78.499.200	27.494.700	27.494.700	

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

2	07	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (sesuaikan jenis nama peralatan/mesin yang dipelihara)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (sesuaikan jenis nama peralatan/mesin yang dipelihara)	0	0	0	
2	07	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi	150.000.000	0	0	
2	07	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Sarana Pendukung Yang di Pelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Sarana Pendukung Yang di Pelihara dan Direhabilitasi	150.000.000	0	0	
	07	02				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	10.000.000	4.904.736	0	REFOCUSING
	07	02	2	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	10.000.000	4.904.736	0	REFOCUSING
	07	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	5.000.000	3.700.536	0	REFOCUSING
	07	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	5.000.000	1.204.200	0	REFOCUSING
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	3.803.000.000	50.230.000	0	REFOCUSING
2	07	03	2	01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	3.803.000.000	50.230.000	0	REFOCUSING

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

2	07	03	2	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	3.803.000.000	50.230.000	0	REFOCUSING
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan	192.000.000	31.414.442	-	REFOCUSING
2	07	04	2	01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat				
2	07	04	2	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Volume Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat	Volume Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat				
2	07	04	2	02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	Tersedianya Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	0	0	0	
2	07	04	2	02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	Jumlah Penyalur Tenaga Kerja yang melaksanakan aturan tentang penempatan tenaga kerja	0	0	0	
2	07	04	2	03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan kesempatan kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan kesempatan kerja	192.000.000	31.414.442	0	REFOCUSING
2	07	04	2	03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	192.000.000	31.414.442	0	REFOCUSING
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terselenggaranya pendataan dan Informasi HI	Terselenggaranya pendataan dan Informasi HI	3.124.468.990	3.516.900.000	4.150.359.196	PENAMBAHAN / PENYESUAIAN JUMLAH PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA | 2023

2	07	05	2	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.084.480.000	3.516.900.000	4.150.359.196	PENAMBAHAN / PENYESUAIAN JUMLAH PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2	01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial	Jumlah Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial	3.084.480.000	3.516.900.000	4.150.359.196	PENAMBAHAN / PENYESUAIAN JUMLAH PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
2	07	05	2	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Tesedianya Perusahaan yang baik yang mengikuti aturan	Tesedianya Perusahaan yang baik yang mengikuti aturan	39.988.990	0	0	
2	07	05	2	02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	39.988.990	0	0	
2	07	05	2	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi penyelesaiannya	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi penyelesaiannya	0	0	0	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023 ini merupakan Rencana Kerja Perubahan tahunan berdasarkan Rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja 2019 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Minahasa serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan tahun lalu.

Dengan adanya Rancangan Awal Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Dalam rangka kelanjutan pembangunan dan berlangsungnya kegiatan di Dinas Tenaga Kerja maka Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan kegiatan yang terkait dengan TUPOKSI yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk Dokumen ini, merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2023.

Di tetapkan di : Tondano

Pada tanggal : September 2023

KEPALA DINAS,



DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002

**PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN
MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	PROGRAM PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	
	Penerbitan Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam 1 daerah	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kabupaten/kota	
	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota :	
	- Pengembangan pelaksanaan Jaminan social tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MINAHASA,**



(Handwritten signature)

**DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002**

**PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) :	
3	PROGRAM PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	
	Penerbitan Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam 1 daerah	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kabupaten/kota	
	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota :	
	- Pengembangan pelaksanaan Jaminan social tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MINAHASA,



DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002